

STATUS HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRRI DAN AKIBAT HUKUMNYA

(STUDI PERBANDINGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:

MARYATUL KIPTYAH
C 100 060 146

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia di muka bumi, sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia dan untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang pernikahan.¹ Allah telah mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan cinta dan kasih sayang, sehingga daur kehidupan akan terus berlangsung dari generasi ke generasi. Jaminan kelangsungan hidup itu sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah SWT Surat Ar-Rum ayat (21):

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*²

Pernikahan merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur

kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu

¹ Syeikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Az-Zawaju Islamil Mubakkir*: Sa'adah, terj. Mustaqim, *Hadihah Untuk Pengantin*, (Jakarta: Mustaqim, Cet 1, 2001), hlm. 28

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terj.* (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 1989), hlm. 644

dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong.³ Selain itu, pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat.⁴

Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi. Maka dibuat aturan dan prosedur guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang merugikan. Di Indonesia, prosedur dan aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam adalah bahwa pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.⁵ Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan PP No. 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 3 dan 4 Tahun 1975 bab II Pasal 2 Ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Seperti diketahui pelaksanaan perkawinan itu didahului kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh calon mempelai maupun oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Calon mempelai atau orang tuanya atau wakilnya memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan (Pasal 3 dan 4 PP No. 9 Tahun 1975). Selanjutnya Pegawai tersebut meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, dan

³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: CV Sinar Baru, Cet 25, 1992), hlm. 348

⁴ Abdul Jalil (Eds), *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm. 285

⁵ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan (Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm. 25.

apakah tidak terdapat halangan menurut Undang-undang. Demikian pula meneliti surat-surat yang diperlukan (Pasal 5 dan 6 PP No. 9 Tahun 1975). Apabila ternyata dari hasil penelitian itu terdapat halangan perkawinan atau belum dipenuhi syarat-syarat yang diperlukan maka keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya (Pasal 7 ayat (2) – PP No. 9 Tahun 1975), bila pemberitahuan itu telah dipandang cukup dan memenuhi syarat-syarat yang diperlukan serta tidak terdapat halangan untuk nikah, maka Pegawai Pencatat membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan menurut formulir yang telah ditetapkan dan menempelnya di Kantor Pencatatan yang mudah dibaca oleh umum.⁶

Pengumuman itu ditandatangani oleh Pegawai Pencatat yang memuat:

- a) Nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri atau suami mereka terdahulu.
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Surat pengumuman itu selama 10 (sepuluh) hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek (Pasal 8 dan 9 PP No. 9 Tahun 1975)⁷. Dalam syari'at Islam, aturan tentang adanya pencatatan nikah baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah sejak mulanya memang tidak mengatur secara kongkrit. Lain halnya dengan ayat mu'amalat yang dalam situasi tertentu

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara cet-2, 1999), hlm. 180

⁷ *Ibid*, hlm. 174

diperintahkan untuk mencatatkan. Namun sesuai perkembangan zaman dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, pemerintah Indonesia mengatur pencatatan perkawinan melalui perundang-undangan dengan tujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.⁸ Melalui pencatatan perkawinan, suami isteri akan memiliki akta nikah sebagai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Apabila terjadi perselisihan atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka suami atau isteri dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁹

Pada kenyataannya, tidak semua masyarakat muslim di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan praktik nikah yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasikan yang dikenal dengan sebutan nikah *sirri* dan sebagian ada yang menyebutnya nikah agama atau nikah di bawah tangan.¹⁰ Namun sampai saat ini, sebagian ulama dan masyarakat umumnya masih belum memiliki kesamaan rumusan yang menimbulkan perbedaan persepsi terhadap nikah *sirri*. Secara normatif, ada yang menilai bahwa praktik nikah *sirri* itu sah dan dapat menimbulkan hikmah positif, sebaliknya ada yang menilai tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif. Dan apabila dilihat dari

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-3, 1998), hlm. 107

⁹ *Ibid*, hlm. 107

¹⁰ Dadi Nurhaedi, *Op.cit...*, hlm. 26

perspektif hukum positif dan norma sosial, nikah *sirri* dianggap sebagai suatu deviasi atau penyimpangan.¹¹

Pernikahan sebagai suatu perbuatan hukum mempunyai akibat-akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan, sah atau tidaknya seorang anak, biaya pendidikan anak.¹² Untuk terlaksana dan sahnya perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan sebagai perbuatan hukum diperlukan adanya kepastian hukum, maka Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹³

Sedangkan dalam KHI Pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai pengertian yuridis tentang sahnya suatu perkawinan ada yang berpendapat bahwa sahnya suatu perkawinan semata-mata hanya harus memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut, yakni dilaksanakan menurut ketentuan syari’ah Islam dengan memenuhi syarat dan rukunnya secara sempurna, sedangkan mengenai pencatatan nikah bukan sebagai syarat sah

¹¹ *Ibid*, hlm. 27-28

¹² Wildan Suyuti Musthofa, “*Nikah Sirri*” (*Antara Kenyataan dan Kepastian Hukum*) dalam *Mimbar Hukum*, VII, 28, 1996, hlm. 34.

¹³ Dirjen BINBAGA Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 1999/2000), hlm. 96

nikah, tetapi hanya kewajiban administratif. Pendapat yang lain, bahwa sahnya suatu akad nikah harus memenuhi ketentuan Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) mengenai tata cara agama dan Pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan syarat kumulatif, yaitu bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut Syari'at Islam disertai pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)".¹⁴

Ali Affandi mengatakan bahwa suatu perkawinan mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban.¹⁵ Dari perkawinan tersebut akan lahir anak-anak sebagai hasil dari perkawinan anak mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai penerus dan pelangsung keturunan kedua orang tuanya. Sehingga sudah semestinya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan luhur serta suci tersebut seorang anak harus dihasilkan dari sebuah proses yang suci dan sah menurut agama Islam dan perundang-undangan.

Nikah sirri adalah sah secara agama, begitu juga ditinjau dari hukum positif Indonesia yaitu berdasarkan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".¹⁶ Sedangkan pencatatan perkawinan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai mana ketentuan pasal 2

¹⁴ Masjfuk Zundi, *Nikah Sirri, Nikah Di Bawah Tangan dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, dalam Mimbar Hukum, hlm. 11

¹⁵ Ali Affandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 93.

¹⁶ *Undang-undang no 1 Tahun 1974 Pasal 2.*

ayat 2 hanya merupakan kewajiban administrasi saja dan untuk memenuhi ketertiban hukum. Menurut hukum islam nikah sirri adalah sah dan istri berhak atas nafkah dari suami, hak mendapat warisan jika suami meninggal dan berhak mendapat bagian dari harta bersama jika terjadi perceraian. Sedangkan dari hukum positif Indonesia nikah sirri sah akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak dicatatkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi sesuatu dalam perkawinannya istri tidak dapat menuntut haknya secara hukum sebagaimana mestinya. Demikian dengan masalah anak yang dilahirkan menurut undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 42 “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹⁷ Dengan begitu anak berhak mendapatkan nafkah, warisan dari orang tuanya. Dalam pasal 43 ayat 1 “ anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdat dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁸ Sedangkan menurut hukum islam anak yang dilahirkan dianggap sah serta berhak atas nafkah dan warisan dari orang tuanya.

Dalam artikel “nikah Sirri dan status anaknya menurut hukum Islam dan hukum positif” karya Masjfuk Zuhdi menyatakan bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut hokum Islam dan positif harus berhati-hati menggunakan dalil syar’inya (Al Qur’an, Sunnah, Qiyas, dsb) maupun dalil-dalil Qonunnya (peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia). Sebab sah atau tidaknya perkawinan akan

¹⁷ Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 42

¹⁸ Ibid

membawa akibat hukum yang luas mengenai status anaknya, harta bersama selama perkawinan maupun status suami istri itu sendiri sehingga bisa berakibat fatal atau merugikan bagi pihak yang bersangkutan apabila salah dalam menerapkan dalil-dalil syari'inya maupun qonuninya.

Mendaftarkan perkawinan di KUA merupakan sesuatu yang sulit bagi masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang arti pentingnya pencatatan itu. Pencatatan dianggap sebagai halangan atau mempersulit orang yang akan melangsungkan pernikahan tanpa memikirkan akibat bagi anak yang dilahirkan. Dampak itu akan terasa ketika anak-anak membutuhkan dokumen-dokumen yang dalam pembuatannya memerlukan syarat akte nikah dari pernikahan orang tuanya. Pernikahan tanpa dicatat di KUA juga akan membawa implikasi pada status anak yang dilahirkan.

Bila ditelusuri eksistensinya secara luas dan mendalam, direnungkan dalam konteks kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, baik secara sosiologis, psikologis maupun yuridis dengan segala akibat hukum dan konsekuensinya tentulah sangat luas objek yang ditimbulkan sangat besar pengaruhnya dalam perkembangan peradaban manusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum anak hasil pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif?

2. Persamaan dan perbedaan status hukum pernikahan sirri menurut hukum islam dan hukum positif Indonesia?
3. Apa akibat hukumnya bagi anak yang dihasilkan dari pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif?

C. Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia pasti mempunyai tujuan tertentu. Demikian pula dalam kegiatan penelitian ini juga mempunyai beberapa tujuan antara lain:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui status hukum anak hasil pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui akibat hukumnya bagi anak dari hasil pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
 - c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dan status hukum dan akibat hukumnya bagi anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri.
 - d. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan status hukum dan akibat hukum anak dari hasil pernikahan sirri menurut hukum islam dan hokum positif Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dalam memutuskan status hukum anak hasil pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif serta

memberikan gambaran jelas tentang akibat hukum bagi anak hasil pernikahan sirri menurut hukum Islam dan hukum positif.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan dan menambah pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang sesuai dengan materi atau masalah yang diteliti, maka diperlukan metode penelitian yang tepat, sesuai, menguntungkan dan relevan dengan ruang lingkup dan judul skripsi yang akan disusun sehingga akan mempermudah analisa maupun kesimpulan. Beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:.

1. Jenis Penelitian

2. Ditinjau dari data yang diteliti, penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau library research¹⁹. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang didasarkan kepada literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

¹⁹ M. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 53

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative yaitu metode pendekatan dengan norma yang ada.

4. Sumber Data

Karena merupakan penelitian kepustakaan, maka jenis datanya adalah data sekunder, adapun sumber data sekunder apabila dilihat dari kekuatan mengikatnya menurut Greogory Chuchi yang diikuti oleh Soerjono Soekanto meliputi:²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum primernya adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, UU Perkawinan, Kitab-kitab Fidh da Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan tema. Oleh karena itulah dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara menggali data dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia beserta pelaksanaannya

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1993, hlm. 36

dan pendapat dari para ahli maupun buku-buku atau karya ilmiah lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilanjutkan dengan menganalisis data. Adapun metode analisa data dalam penelitian ini adalah melalui:

a) Metode Deduktif

Yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan secara khusus. Disini akan terlihat bagaimana peraturan Perundang-undangan yang ada (disamping teori hukum dan prinsip-prinsip keislaman) dijadikan alat untuk menarik kesimpulan.

b) Metode induktif yaitu cara berfikir dimana dalam menarik kesimpulan yang bersifat umum dari beberapa kasus yang bersifat khusus. Operasionalisasi metode ini adalah dengan mengungkapkan pendapat-pendapat para praktisi hukum atau tokoh agama atau ulama terlebih dahulu kemudian dibahas untuk selanjutnya diambil kesimpulan dari pembahasan tersebut.

F. Sistematika Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas, maka di bawah ini akan penulis kemukakan sistematika yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Perkawinan Menurut Hukum Islam
 - 1. Pengertian
 - 2. Syarat dan Rukun Perkawinan
 - 3. Tujuan Perkawinan
 - 4. Hikmah Perkawinan
- B. Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - 1. Pengertian
 - 2. Syarat Syarat Perkawinan
 - 3. Tujuan Perkawinan UU No.1 Tahun 1974
 - 4. Asas-asas Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974
 - 5. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU No.1 Tahun 1974
- C. Perkawinan Sirri atau Pernikahan Sirri
 - 1. Pengertian Nikah Sirri
 - a. Menurut hukum islam
 - b. Menurut hukum positif indonesia
 - 2. Faktor-faktor yang Mendorong Melakukan Pernikahan Sirri
 - 3. Kelebihan dan Kelemahan Perkawinan Sirri

D. Anak Sah dan Anak Tidak Sah

1. Menurut Hukum Islam
 - a. Anak Sah menurut Hukum Islam
 - b. Anak tidak Sah menurut Hukum Islam
2. Menurut Hukum Positif Indonesia
 - a. Anak Sah Menurut Hukum Positif
 - b. Anak tidak Sah Menurut Hukum Positif

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Tanpa Dicatatkan
Dikantor Pencatatan Nikah Menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia
2. Persamaan dan Perbedaan Status Hukum Pernikahan Tanpa
Dicatatkan Dikantor Pencatatan Nikah Menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif Indonesia
3. Akibat Hukum bagi Anak Hasil Pernikahan Tanpa
Dicatatkan Dikantor Pencatatan Nikah Menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif Indonesia

B. Hasil Pembahasan

1. Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Tanpa Dicatatkan
Dikantor Pencatatan Nikah Menurut Hukum Islam dan
Hukum Positif Indonesia
2. Persamaan dan Perbedaan Status Hukum Pernikahan Tanpa
Dicatatkan Dikantor Pencatatan Nikah Menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif Indonesia

3. Akibat Hukum bagi Anak Hasil Pernikahan Tanpa
Dicatatkan Dikantor Pencatatan Nikah Menurut Hukum
Islam dan Hukum Positif Indonesia

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA